

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ancaman kebakaran merupakan bahaya yang dapat menjadi bencana besar dengan akibat yang luas terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan yang efisien dan efektif. Sumber Daya Pemadam Kebakaran Profesional yang terbatas di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, sumber daya pemadam kebakaran profesional mungkin terbatas, termasuk personel, peralatan, dan anggaran. Sebagai respons terhadap keterbatasan ini, satuan relawan kebakaran sering menjadi garda terdepan dalam memadamkan kebakaran dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Adapun keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, dan oleh SATWANKAR yang dibentuk dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Tujuan pelibatan SATWANKAR dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah untuk membantu mencapai response time, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran.

Di beberapa wilayah, risiko kebakaran tinggi akibat faktor seperti iklim kering, vegetasi yang rentan terhadap kebakaran, atau aktivitas manusia. Hal ini membuat keberadaan satuan relawan kebakaran yang terlatih dan siap siaga menjadi sangat penting untuk merespons kebakaran secepat mungkin. Waktu Respons yang Kritis: Dalam penanggulangan kebakaran, waktu sangat berharga. Semakin cepat kebakaran dapat dipadamkan atau dikendalikan, semakin sedikit kerusakan yang terjadi. Satuan relawan kebakaran yang terlatih dengan baik dapat memberikan respons yang cepat saat kebakaran terjadi.

Satuan relawan kebakaran tidak hanya berperan dalam pemadaman kebakaran, tetapi juga dalam pencegahan. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindakan pencegahan kebakaran dan mengajarkan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat. Kemampuan untuk Mengisi Kekosongan. Di beberapa daerah, sulit untuk merekrut dan mempertahankan personel pemadam kebakaran profesional. Relawan kebakaran bisa menjadi solusi untuk mengisi kekosongan ini, memberikan tambahan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Dukungan Komunitas: Satuan relawan kebakaran sering kali berasal dari komunitas tempat mereka tinggal. Mereka memiliki pengetahuan lokal dan dukungan komunitas yang kuat, yang dapat meningkatkan efektivitas dalam tugas mereka. Pengalaman dan Keterampilan: Banyak relawan kebakaran adalah profesional dalam pekerjaan lain, seperti petani, guru, atau pekerja konstruksi. Mereka membawa keterampilan yang berguna dalam situasi kebakaran, seperti pemahaman tentang tanah air dan lingkungan lokal.

Peningkatan Dampak Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat menyebabkan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah meningkat. Relawan kebakaran yang terlatih dengan baik dapat memainkan peran penting dalam upaya mitigasi dan pemadaman kebakaran yang diperlukan.

Relawan kebakaran biasanya memiliki motivasi tinggi dan semangat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan mereka. Ancaman kebakaran dapat diartikan sebagai suatu bencana yang besar. Sehingga, dapat mengakibatkan kerusakan yang parah mulai dari kehilangan harta benda sampai dengan mengancam keselamatan jiwa. Kebakaran seringkali mengakibatkan kerugian secara materi, dan menghentikan aktivitas usaha serta mengancam keselamatan. Biasanya kebakaran sering terjadi di pemukiman yang padat penduduk sehingga terjadi di lingkup masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah karena kurangnya persiapan awal untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kebakaran sering kali terjadi di pemukiman padat penduduk ini menjadi masalah

besar karena sulitnya diatasi dan sulitnya untuk dicegah. Memasuki bulan juni tahun 2023, di wilayah kota Bandung tercatat 124 kejadian kebakaran. Kebakaran yang terjadi di sembilan gedung di kawasan perbelanjaan Pasar Caringin dan Jalan Peta pada awal Juni lalu merupakan salah satu kebakaran yang terjadi di Kota Bandung. Menurut pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah (Diskar PB) Kota Bandung, “jumlah kebakaran yang terjadi di Bandung sejak tahun 2023 hingga 6 Juli 2023 sebanyak 124”.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa masih kurangnya keterlambatan penyampaian informasi pada pemukiman saat terjadinya kebakaran sehingga dapat menghambat proses pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran yang di sebabkan oleh jalan yang macet, sulitnya memperoleh air dari lokasi kebakaran yang sulit di jangkau oleh alat dan kendaraan yang telah di sediakan pemadam kebakaran untuk menanggulangi proses memadamkan api.

Terdapat beberapa cara untuk mengurangi tingkat bahaya dan resiko kebakaran harus didukung dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi dan untuk mencegah kebakaran secara dini, surat keputusan nomor: 364/kep.392-DDPK/2013 dikeluarkan oleh wali kota yang berisi tentang membentuk satuan relawan kebakaran di seluruh kota bandung pada masing – masing kelurahan. Meskipun telah dibentuk satuan relawan kebakaran pada masing – masing kelurahan di Kota Bandung, namun hingga saat ini, Satwankar ini belum beroperasi dengan maksimal. Hal ini dapat diperlihatkan melalui data berikut ini:

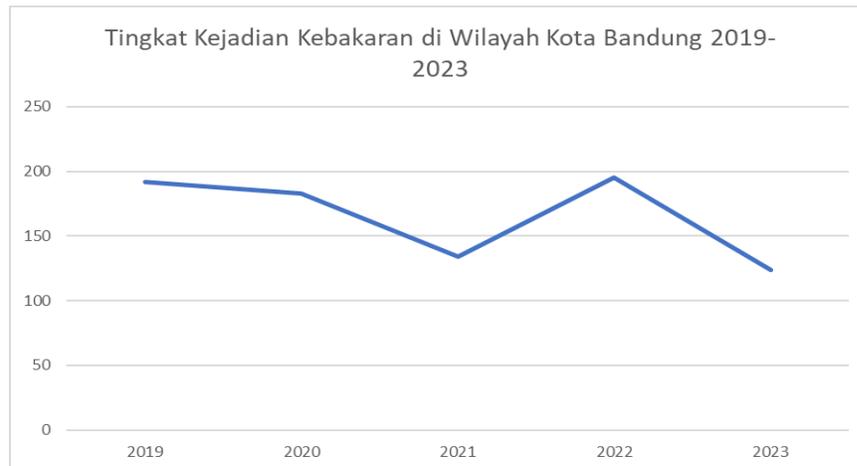
1. Melihat dari perspektif legitimasi keanggotaan yang kurang jelas, mengetahui perbedaan antara hak dan kewajiban hingga tanggung jawab anggota yang memiliki sifat sukarela (*volunteer*), mengakibatkan ikatan keanggotan ini jadi lemah.

2. Ketidakjelasan dalam struktur kelembagaan garis komando atau pemerintahan, khususnya mengenai arah hubungan “dari siapa kepada siapa” dalam konteks satwankar, dapat menyebabkan anggota satwankar dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok dengan tugas yang tumpang tindih, seperti linmas, petugas ronda, dan sebagainya.

Sebuah perusahaan diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan – kebijakan strategis terkait pelayanan guna menghadapi persaingan yang semakin ketat. Salah satu elemen krusial dalam sebuah organisasi adalah keunggulan dalam pelayanan yang dimilikinya. Kelebihan yang didapat dari pelayan pada organisasi atau perusahaan dapat menjadi faktor kesuksesan suatu perusahaan untuk menghadapi ancaman dan tantangan dengan menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan dalam waktu jangka panjang.

Bahwa kinerja dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggungjawabnya, sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pandangan yang lain, kinerja dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya serta bagaimana hasil yang didapat dari pekerjaannya tersebut. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kerja. (Fadjar Trisakti, Husen Saeful Anwar, Fetty Patimah Lestary & Engkus, 2020).

Menyadari signifikan peranan kualitas pelayanan dalam keberlanjutan suatu organisasi atau perusahaan, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar mutu dan jumlah pelayanan yang disediakan bisa bersaing atau dapat sejajar dengan pesaing lainnya di dunia bisnis.

**Gambar 1. 1****Tingkat Kejadian Kebakaran Di Wilayah Kota Bandung 2019-2023**

Berdasarkan diagram di atas, data dalam 4 tahun terakhir tingkat kebakaran pada pemukiman warga semakin meningkat. Bahkan, pada bulan keenam tahun 2023, Kota Bandung telah mencatat data kebakaran sebanyak 124 kali. Adapun kejadian beberapa peristiwa kebakaran yang mengesankan terjadi belakangan ini, diantaranya kebakaran di beberapa toko yang ada di Pasar Caringin yang terjadi pada awal Juni lalu dan terbakarnya sembilan bangunan di Jalan Peta.

Berdasarkan diagram di atas, data dalam 4 tahun terakhir tingkat kebakaran pada pemukiman warga semakin meningkat. Bahkan, pada bulan keenam tahun 2023, Kota Bandung telah mencatat data kebakaran sebanyak 124 kali. Adapun kejadian beberapa peristiwa kebakaran yang mengesankan terjadi belakangan ini, diantaranya kebakaran di beberapa toko yang ada di Pasar Caringin yang terjadi pada awal Juni lalu dan terbakarnya sembilan bangunan di Jalan Peta.

Aparatur pemerintahan memberikan pemberian layanan kepada masyarakat dalam aspek penyelamatan, khususnya oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Adanya fungsi lembaga tersebut di suatu daerah keberadaannya dianggap sangat krusial, tidak hanya dalam menyelamatkan

masyarakat dari risiko kebakaran, tetapi juga memberikan bantuan dalam berbagai situasi darurat seperti kecelakaan, banjir, dan peristiwa musibah lainnya.

Undang-Undang Kementerian Dalam Negeri No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk dalam kategori layanan darurat atau layanan penyelamatan, yang mencakup operasi penyelamatan serta ambulans dan badan SAR nasional. Hal ini juga berlaku pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang menjalankan tugas yang berdampak pada kehidupan pekerja dan korban. Karena tingginya risiko tersebut, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebaiknya meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan manajemen yang diharapkan dalam penanggulangan bencana kebakaran, terutama pada tingkat waktu tanggap yang masih belum sempurna karena banyak permasalahan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana kota Bandung yaitu kurangnya petugas yang dinilai kurang optimal. Keadaan ini memiliki dampak kepada kualitas pelayanan dikarenakan menurut data jumlah pegawai ASN di seluruh bidang hanya terdapat 192 orang.

Indikator standar kualitas pelayanan meliputi jumlah pegawai dan faktor lain yang menunjukkan standar kualitas pelayanan, yang dikenal dengan atau yang dikenal sebagai tingkat waktu tanggap (response time rate), yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tingkat waktu tanggap WMK (Fire Management Area) membandingkan kejadian dimana kebakaran dapat dikendalikan dalam waktu 15 menit di kawasan pemukiman, pabrik/industri dan pemukiman, dan 60 menit di kawasan pedesaan dan hutan. Langkah ini terkait dengan banyaknya kejadian kebakaran di WMK.

Berdasarkan diagram di atas, data dalam 4 tahun terakhir tingkat kebakaran pada pemukiman warga semakin meningkat. Bahkan, pada bulan keenam tahun 2023, Kota Bandung telah mencatat data kebakaran sebanyak 124 kali. Adapun kejadian

beberapa peristiwa kebakaran yang mengesankan terjadi belakangan ini, diantaranya kebakaran di beberapa toko yang ada di Pasar Caringin yang terjadi pada awal Juni lalu dan terbakarnya sembilan bangunan di Jalan Peta.

Berdasarkan diagram di atas, data dalam 4 tahun terakhir tingkat kebakaran pada pemukiman warga semakin meningkat. Bahkan, pada bulan keenam tahun 2023, Kota Bandung telah mencatat data kebakaran sebanyak 124 kali. Adapun kejadian beberapa peristiwa kebakaran yang mengesankan terjadi belakangan ini, diantaranya kebakaran di beberapa toko yang ada di Pasar Caringin yang terjadi pada awal Juni lalu dan terbakarnya sembilan bangunan di Jalan Peta.

Aparatur pemerintahan memberikan pemberian layanan kepada masyarakat dalam aspek penyelamatan, khususnya oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Adanya fungsi lembaga tersebut di suatu daerah keberadaannya dianggap sangat krusial, tidak hanya dalam menyelamatkan masyarakat dari risiko kebakaran, tetapi juga memberikan bantuan dalam berbagai situasi darurat seperti kecelakaan, banjir, dan peristiwa musibah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa SATWANKAR di Dinas Kebakaran Kota Bandung belum optimal. Hal ini diduga karena jumlah data relawan pada tahun 2023-2024 masih dibawah tahun sebelumnya, yang berjumlah 521. Hal ini terjadi karena sumber daya yang masih kurang dan skill yang perlu diarahkan kembali atau menambah skill-skill selain dengan pemadaman kebakaran.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa SATWANKAR di Dinas Kebakaran Kota Bandung belum optimal. Hal ini diduga karena aspek-aspek kinerja belum dilaksanakan. Aspek kinerja yang dimaksud ialah seperti yang dikatakan dalam buku Sedermayanti (2001) bahwa Optimalisasi Kinerja Dalam Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) masih ada yang belum optimal dapat dilihat dari ukuran ketepatan waktu (*Promptness*) adanya keterbatasan sumber daya manusia karena banyak anggota Satwankar direkrut dari linmas yang memiliki kesibukan lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (Lembaga Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaga Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012) merupakan upaya pemerintah kota untuk meningkatkan keselamatan warga dan meminimalisir risiko kebakaran melalui berbagai langkah pencegahan serta penanggulangan yang efektif. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam upaya penanggulangan kebakaran, termasuk pengaturan tentang retribusi untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang bertujuan untuk memastikan semua alat dalam kondisi siap pakai. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran. Pemerintah kota mengharapkan partisipasi aktif dari warga dan pemilik bangunan dalam menjalankan kewajiban mereka, seperti menyediakan dan memelihara alat pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Melalui sosialisasi dan pelatihan yang rutin, diharapkan warga dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi darurat kebakaran, sehingga dapat mengurangi risiko cedera dan kerugian harta benda. Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban pemeriksaan berkala terhadap alat pemadam kebakaran oleh pihak berwenang untuk memastikan efektivitasnya. Retribusi yang dikenakan atas pemeriksaan ini digunakan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan peralatan serta kegiatan penanggulangan kebakaran lainnya. Hal ini mencakup pembelian alat pemadam kebakaran baru, perawatan alat yang sudah ada, dan pengembangan sistem deteksi kebakaran yang lebih canggih. Secara keseluruhan, Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap

bahaya kebakaran. Dengan penerapan yang konsisten dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, tujuan untuk mengurangi insiden kebakaran dan dampak negatifnya dapat tercapai secara efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apakah tersedia rencana respons kebakaran yang terkoordinasi dan dapat diandalkan di Kota Bandung, dan sejauh mana rencana ini telah diuji coba dan ditingkatkan?
2. Apa hambatan utama yang dihadapi oleh Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) ?
3. Bagaimana efektivitas pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada anggota Satwankar dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam penanganan kebakaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan diketahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis Tantangan Utama: Tujuan pertama adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh Satwankar dalam melaksanakan tugas mereka di Kota Bandung. Hal ini bertujuan untuk memahami dengan lebih baik akar penyebab masalah yang perlu diatasi.
2. Mengembangkan Rencana Respons Kebakaran: Tujuan ini adalah untuk mengembangkan rencana respons kebakaran yang terkoordinasi dan dapat diandalkan di Kota Bandung, serta memastikan bahwa rencana tersebut telah diuji coba dan ditingkatkan.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Tujuan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat di Kota Bandung tentang bahaya kebakaran melalui kampanye edukasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Peningkatan Keselamatan Masyarakat: Dengan meningkatnya kinerja Satwankar, penanganan kebakaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ini berarti respon yang lebih baik dan cepat dalam situasi darurat, dengan gilirannya akan meningkatkan keselamatan dan perlindungan masyarakat di Kota Bandung.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kampanye edukasi yang dilakukan oleh Satwankar sebagai bagian dari penelitian ini dapat menjadi kesadaran yang meningkat bagi masyarakat mengenai bahaya kebakaran dan tindakan pencegahan. Sehingga bisa membantu masyarakat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan mereka.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kejadian kebakaran adalah suatu kejadian yang bisa menimbulkan bencana berupa kehilangan nyawa atau harta benda, yang dapat terjadi di berbagai tempat. Menurut Rigen Adi Kowara & Tri Martiana (2017). Kebakaran dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni bencana alam dan bencana non-alam, sebagaimana dijelaskan oleh (Ruth, Shidarta, Dan Arif 2014). Kebakaran yang masuk dalam kategori bencana alam mencakup kejadian yang disebabkan oleh petir, erupsi gunung berapi, serta kondisi kekeringan. Bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembuangan puntung rokok sembarangan, penggunaan peralatan masak, penggunaan listrik, dan sebainya dapat disebut sebagai bencana non alam.

Risiko kebakaran tinggi akibat faktor seperti iklim kering, vegetasi yang rentan terhadap kebakaran, atau aktivitas manusia. Hal ini membuat keberadaan satuan relawan kebakaran yang terlatih dan siap siaga menjadi sangat penting untuk secepat mungkin merespons kebakaran. Waktu Respons yang Kritis: Dalam penanggulangan kebakaran, waktu sangat berharga. Semakin cepat kebakaran dapat dipadamkan atau dikendalikan, semakin sedikit kerusakan yang terjadi. Satuan relawan kebakaran yang terlatih respons yang cepat saat kebakaran terjadi.

Menurut Huda (2018) Optimalisasi berawal dari istilah “optimal” artinya paling baik atau paling tinggi. Dalam konteks mengoptimalkan, hal tersebut merujuk pada upaya menjadikan sesuatu menjadi terbaik atau mencapai tingkat tertinggi. Sehingga, optimalisasi adalah suatu proses dimana sesuatu diusahakan atau diarahkan agar mencapai tingkat keunggulan atau kualitas yang paling optimal atau tertinggi.

Dalam Teori dari Sedarmayanti (2001), menyebutkan jika kinerja terdiri dari beberapa aspek, yaitu: *Quality of Work* (Kualitas Kerja), *Promptness* (Ketepatan Waktu), *Initiative* (Inisiatif), *Capability* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi):

a. *Quality of Work* (Kualitas Kerja)

Kualitas kerja (*Quality of work*) adalah kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kemampuannya yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sedarmayanti (2001) mendefinisikan kualitas kerja pegawai adalah seorang pegawai yang memenuhi syarat kualitatif yang dituntut oleh pekerjaannya, sehingga pekerjaan itu benar-benar dapat diselesaikan.

Petugas SATWANKAR berbeda-beda tingkatannya. Peningkatan kualitas anggota tidak hanya sekedar keinginan akan persatuan, namun juga memotivasi para manajer untuk meningkatkan prestasi kerja dengan harapan dapat menyeimbangkan imbalan dan pengorbanan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas dan tugas yang diberikan. Mutu pekerjaan dapat diperiksa apabila hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang direncanakan. Dimensi Pengabdian Kepada Masyarakat juga menjadi ukuran kualitas kerja dalam hal pelayanan masyarakat. Alasan ekonomi melatarbelakangi berbagai motivasi anggota SATWANKAR. Kebutuhan manusia dapat memotivasi setiap individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota SATWANKAR, mengetahui bahwa terdapat undang-undang berupa Surat Keputusan No: 364/Kep.392-DPPK/2013 tentang pengangkatan petugas pemadam kebakaran tingkat kecamatan di seluruh kota Bandung dirasa kurang memadai. Salah satunya, kehidupan SATWANKAR yang dikenakan APBD masih belum jelas. Anggota SATWANKAR juga mempunyai keluarga yang harus dinafkahi, jadi biayanya harus masuk akal. Hal ini menyulitkan motivasi anggota SATWANKAR karena kurangnya transparansi dalam kompensasi.

b. *Promptness* (Ketepatan Waktu)

Ketepatan waktu (*Pomptness*) yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain.

Mengevaluasi atau mengukur keefektifan suatu tugas atau kegiatan dilihat dalam kedisiplinan waktu. Oleh karena itu, meskipun setiap kegiatan dapat dikelola sesuai disiplin ilmunya, namun hal tersebut berpengaruh pada kekuatan sumber daya manusia yang tersedia, serta sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk

mencegah dan menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya serta keselamatan masih kurang. Dari informasi yang diperoleh dari wawancara dengan anggota SATWANKAR di tingkat kelurahan, terlihat jelas bahwa sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sangat terbatas dan tidak ada.

c. *Initiative* (Inisiatif)

Inisiatif (*Initiative*) yaitu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa harus bergantung terus menerus kepada atasan.

Apabila unsur sumber daya manusia dapat bekerja sesuai keterampilan dan kemampuannya, maka tujuan organisasi akan tercapai. Salah satu faktor pendorong prestasi organisasi adalah faktor manusia. Anggota organisasi harus diberdayakan untuk menjadi kreatif dalam peran dan tanggung jawab mereka untuk memberikan layanan yang tepat. Tujuan dibentuknya SATWANKAR adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam tanggap dini dan pencegahan kebakaran. Prinsip-prinsip yang harus ada untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran adalah prinsip-prinsip pelaksanaan program: meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku dalam pengembangan keterampilan sosial sehingga masyarakat dapat memperluas pengetahuan dan merevitalisasi komunitasnya. Pada dasarnya manusia mengembangkan dirinya dan lingkungannya karena mempunyai ilmu. Jadi masyarakat harus memiliki pengetahuan agar tidak hanya mengandalkan SATWANKAN dan petugas pemadam kebakaran. Hal ini dapat memprioritaskan kebutuhan kelompok demi kelangsungan hidup banyak orang seiring dengan berkembangnya lingkungan, bertambahnya populasi, dan jalan pemukiman menjadi lebih sempit. Keanggotaan dalam asosiasi, pelatihan dan pendampingan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat membantu mencegah kebakaran.

Namun wawancara dengan pejabat setempat mengungkapkan bahwa jangkauan masyarakat lokal dan anggota SATWANKAR dalam layanan pencegahan kebakaran sangat terbatas. Karena SATWANKAR dibentuk tanpa bimbingan berkala dari pemerintah kota, pertukaran informasi menjadi terbatas saat mengikuti pelatihan dan simulasi pengelolaan kebakaran bersama masyarakat. Selain itu, status penduduk musiman yang tinggal di masyarakat merupakan hambatan lain terhadap partisipasi masyarakat. Dan, anggota SATWANKAR sebagian besar adalah laki-laki yang bekerja di luar rumah dan tidak selalu berada di rumah

d. *Capability* (Kemampuan/Kesanggupan)

Kemampuan (*Capability*) yaitu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan.

Kualitas dan prestasi kerja dipengaruhi oleh kemampuan atau kesanggupan karyawan dalam melaksanakan tugas. Sehingga kemampuan tersebut harus dijaga serta dikembangkan. Melalui pendidikan dan pelatihan dianggap metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja karyawan. Adanya SATWANKAN sejatinya difungsikan untuk melakukan pelatihan, simulasi, dan penyuluhan bagi masyarakat tentang pencegahan, penanggulangan, dan bahaya kebakaran. Sehingga SATWANKAR harus membuat model yang sistematis dan berjenjang menurut tingkatannya mulai dari dinas pemadam kebakaran, suku dinas, pemadam kebakaran, hingga ketinggian kecamatan, kelurahan, RW, dan RT yang memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan mengatasi paska kebakaran, selain untuk memperingati agar selalu waspada terhadap kebakaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh Ketika wawancara di tingkat kelurahan menyatakan jika pemahaman SATWANKAR masih minim, sehingga belum memahami dengan jelas mengenai tugas, pokok, dan fungsi SATWANKAR

dan belum jelasnya status keberadaan SATWANKAR dalam SOP pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Mutu dan kinerja kerja dipengaruhi oleh kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu kemampuan tersebut harus dipertahankan dan dikembangkan. Pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai. Kehadiran SATWANKAR didedikasikan untuk melakukan pelatihan, simulasi dan diskusi masyarakat mengenai pencegahan, pengelolaan dari risiko kebakaran. Oleh karena itu, SATWANKAR bermaksud menciptakan model yang sistematis dan tertib, mulai dari pemadam kebakaran, divisi, posko pemadam kebakaran dan tenaga preventif sesuai wilayah, tingkat RW dan RT. Informasi yang diperoleh dari wawancara di tingkat daerah mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang SATWANKAR masih sedikit, belum ada pemahaman yang jelas mengenai maksud, tujuan dan kegiatan SATWANKAR serta status keberadaan SATWANKAR untuk SOP pencegahan dan pemadaman kebakaran belum dipahami dengan baik..

e. *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi (*Communication*) merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Komunikasi akan menimbulkan kerja sama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan-hubungan yang semakin harmonis diantara pegawai dan para atasan yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan.

Komunikasi adalah tindakan bertukar informasi antara dua orang atau lebih, baik dengan bertukar pesan atau menanggapi pesan yang dikirimkan melalui proses umpan balik. Ketika komunikasi baik maka terciptalah proses-proses yang mendukung kelancaran fungsi dan meningkatkan kualitas kerja, termasuk komunikasi vertikal dan horizontal serta komunikasi eksternal dalam bentuk pelayanan. Dalam implementasi kebijakan, berbagai kelompok

harus dilibatkan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, dalam membuat suatu kebijakan, harus ada dialog antara penerbit kebijakan dan entitas yang menegakkan kebijakan tersebut. Apabila terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan berhasil diimplementasikan, namun jika komunikasi tidak efektif maka implementasi kebijakan tersebut bisa saja gagal. Saat ini, informasi yang diperoleh dari wawancara komunikasi sebatas intruksi di lapangan saja, namun tidak memberikan argumen yang jelas. Sehingga anggota SATWANKAR mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan kegiatan sosial sambil menerapkan kebijakan dan prosedur untuk segera menangani kejadian kebakaran di masyarakat.

Protokol komunikasi darurat yang jelas dan latihan rutin memastikan bahwa semua anggota SATWANKAR Dinas Kebakaran Kota Bandung terlatih untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Selain itu, dinas juga berperan aktif dalam melakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran. Kampanye ini mencakup penyebaran informasi melalui media massa, media sosial, dan kegiatan tatap muka seperti seminar dan pelatihan di lingkungan masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kebakaran dan tindakan yang harus diambil jika terjadi kebakaran.

Dengan demikian, komunikasi yang terstruktur dan latihan rutin menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan publik dan efisiensi operasional SATWANKAR. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkoordinasi dengan baik dan merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat, sehingga risiko dapat diminimalkan dan tindakan penyelamatan dapat dilakukan secara efektif.

Kebijakan yang melandasi teori optimalisasi teruang dalam menjadi landasan utama kebijakan teori optimalisasi untuk mengukur ketercapaian sasaran kerja dan perilaku pegawai dengan sistematis dan objektif.

**Gambar 1. 2**

**Kerangka Pemikiran**



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dan sejalan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan studi pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, antara lain :

1. Dalam penelitiannya yang berjudul “ OPTIMALISASI KINERJA SATUAN RELAWAN KEBAKARAN (SATWANKAR) DI KOTA BANDUNG” Didin Wardhana (2018) Bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara mengoptimalkan kinerja Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) di Kota Bandung.
2. “Sistem Informasi Manajemen Untuk Optimalisasi Kinerja Pada UPT Pemadam Kebakaran Pati” Listiarini Edy Sudiati , Anita Silviana , Ninik Haryani (2020) Bertujuan Untuk mengetahui tentang bagaimana perananan sistem informasi manajemen (SIM) pada pemadam kebakaran.
3. “OPTIMALISASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI (SUATU TINJAUAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN)” MD SUKAMTO (2018) Bertujuan Untuk melihat pelaksanaan dari peraturan ini, maka peneliti mengujinya pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Didin Wardhana	OPTIMALISASI KINERJA SATUAN RELAWAN KEBAKARAN (SATWANKAR) DI KOTA BANDUNG.	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui pembentukan SATWANKAR di tingkat kelurahan di seluruh kota Bandung masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti sifat sukarela (volunteer) yang membuat ikatan keanggotaan cenderung kurang kuat, pola rekrutmen anggota baru yang masih kurang jelas, keterbatasan anggaran dalam pembinaan anggota SATWANKAR, dan tidak adanya sistem atau jaringan komunitas terintegrasi yang dapat mempermudah koordinasi antara aparat dan masyarakat	Kajian yang dilakukan oleh Didin Wardhana ini terkait dengan Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) Di Kota Bandung yang mana ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan.	Fokus yang diteliti oleh Didin Wardhana meneliti tentang Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) Di Kota Bandung sedangkan yang akan meneliti ini tentang Optimalisasi Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Dalam Satuan

		terdampak bencana kebakaran.		Relawan Kebakaran (SATWANKAR) Di Kota Bandung.
Listiarini Edy Sudiati , Anita Silviana , Ninik Haryani	Sistem Informasi Manajemen Untuk Optimalisasi Kinerja Pada UPT Pemadam Kebakaran Pati.	Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan data, analisis data kebakaran, dan pelayanan pemadam kebakaran yang telah dilakukan sejauh ini masih menggunakan pendekatan manual. Pelaporan kejadian kebakaran masih dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke kantor atau melalui telepon, yang dianggap kurang aman dan kurang akurat . dengan diperkenalkannya rancangan sistem informasi manajemen, proses akses terhadap jadwal pegawai dan penanganan keluhan layanan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan mengunjungi	Kajian ini sama meneliti tentang Optimalisasi Kinerja.	Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu membahas sistem informasi manajemennya .

		kantor, kini dapat diakses melalui situs web UPT pemadam kebakaran.		
MD SUKAM TO	OPTIMALISASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI (SUATU TINJAUAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PADA SUKU DINAS PENANGGULA NGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN)	berdasarkan hasil wawancara kantor ini sudah mengimplementasi kannya dengan baik, dimulai dari Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Larangan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Penerapan Hukum Pegawai Negeri Sipil.	Kajian ini sama sama meneliti tentang di Dinas Kebakaran Dan Penanggulan Bencan dan Memiliki Metode Penelitiannya dengan metode kualitatif.	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam disiplin kerja pegawai dinas penanggulan kebakaran.

#### G . Proposisi

Dalam kinerja satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung bisa dikatakan optimal bila mencapai target yang ditetapkan yaitu : *Quality of Work* (Kualitas Kerja), *Promptness* (Ketepatan Waktu), *Inisiative* (Inisiatif), *Capability* (kapabilitas), dan *Communication* (Komunikasi).